

ANTUSIASME WARGA KELURAHAN NGAGEL REJO SURABAYA JELANG PEMILIHAN WALI KOTA 2020

**Maulana Firdaus* , Liesmay Dwi, Ridho Akbar, Adinda Ajeng, Ike Dewi, Agus
Machfud Fauzi**

***Email Korespondensi : firdausmaulana262@gmail.com**

Progam Studi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Abstrac

The first direct election since 2004 until now in 2020 still leaves the problem of low enthusiasm and community participation. This condition is getting worse and has the potential to become a problem in the election of the mayor of Surabaya due to the expiration of two periods of Tri Risma harini as the mayor of Surabaya. Placing the people of Surabaya in a difficult position to elect a new leader of Surabaya. Allegedly the departure of Tri Risma harini will exacerbate the low enthusiasm of the community in the mayor election in 2020. The purpose of this study is to find out how the enthusiasm of the residents of the Ngagel Rejo urban village of Surabaya ahead of the 2020 pilwali. Using descriptive qualitative methods will thoroughly describe community enthusiasm. With Max Weber's theory of social action approaches and Fukuyama's concept of public trust. The results showed that the enthusiasm of the community was still very low, it was shown from the low curiosity, lack of knowledge about the figure of the candidate for mayor, pessimism, loss of trust in the government and politicians to the general election which he considered a regular 5 year routine and better used for work .

Keyword : Election, enthusiasm, participation

Abstrak

Pemilihan umum langsung di Kota Surabaya 2020 mendatang terancam mengalami penurunan partisipasi politik . Kondisi ini semakin buruk dan berpotensi menjadi persoalan pada pemilihan Wali Kota Surabaya dikarenakan habisnya dua periode Tri Risma harini sebagai Wali Kota Surabaya. Menempatkan masyarakat Kota Surabaya pada posisi yang sulit untuk memilih pemimpin baru Surabaya. Disinyalir hengkangnya Tri Risma harini ini akan memperparah rendahnya antusiasme masyarakat dalam pemilihan waliKota tahun 2020. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana antusiasme warga Kelurahan Ngagel Rejo Kota Surabaya jelang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2020. Menggunakan metode kualitatif deskriptif akan menggambarkan secara menyeluruh terkait antusiasme masyarakat. Dengan pendekatan teori tindakan sosial Max weber dan konsep kepercayaan publik Fukuyama. Hasil penelitian menunjukan bahwa antusiasme masyarakat masih sangat rendah hal ini ditunjukan dari sisi rendahnya keingintahuan, kurangnya pengetahuan tentang sosok calon Wali Kota, pesimisme, hilangnya kepercayaan kepada pemerintah dan politisi hingga pemilihan umum yang dianggapnya sebagai rutin 5 tahunan biasa dan lebih baik digunakan untuk bekerja.

Kata kunci : Pemilu, Antusiasme, Partisipasi

A. Pendahuluan

Pemilihan Wali Kotayang selanjutnya disebut dengan pemilihan kepala daerah merupakan sebuah kegiatan pemilihan yang dilakukan oleh daerah tertentu. Wali Kota sendiri diterapkan pada daerah-daerah perkotaan seperti yang ada di Surabaya. Pemilihan Wali Kota atau yang sering disebut sebagai pilwali ini diberlakukan sejak adanya peraturan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang undang tersebut menjelaskan bahwa adanya pemimpin yang menjabat sebagai kepala daerah mulai diberlakukan dengan cara pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Hal ini yang menjadikan pilwali sebagai sebuah kegiatan yang hampir sama dengan pemilihan lainnya hanya saja memiliki lingkup jabatan yang lebih meluas tertuju pada Kota.

Wali Kota merupakan sebuah jabatan yang sama dengan bupati, memiliki tugas yang sama dalam mengatur otonomi pemerintahan. Hanya saja, Wali Kota memimpin daerah Kota sedangkan bupati memimpin wilayah kabupaten. Wali Kota memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dimana tingkatnya itu berbeda berdasarkan dari kriteria wilayahnya. Dimana Kota atau perkotaan itu memiliki nilai yang lebih modern atau lebih maju dalam hal infrastruktur,

perekonomian maupun sumber dayanya dibandingkan dengan kabupaten. Sehingga jabatan sebagai Wali Kota juga harus memiliki dominasi yang kuat untuk memberikan amanah atau kepercayaan dalam memimpin suatu Kota. Namun, untuk sistem pemilihannya sama-sama melalui pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat.

Pada awalnya pemilihan Wali Kota ditentukan oleh usungan pasangan calon yang sudah memiliki latar belakang dari partai politik atau gabungan dari partai politik. Sebagai bentuk memperkuat upaya dalam pemilihan wali Kota. Kemudian mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 dimana untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kotabisa diusungkan oleh beberapa masyarakat dukungan tanpa perlu adanya partai politik. Namun juga ditentukan dengan berbagai kategori dalam pengusungannya. Asalkan memiliki dukungan yang cukup serta kemampuan yang dianggap mampu dalam memimpin sebuah wilayah Kota. Hal ini yang membuat beberapa peraturan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 ada beberapa yang dirubah untuk menyesuaikan undang-undang yang telah dibentuk setelahnya.

Pilwali sendiri diselenggarakan oleh Komisi

Pemilihan Umum yang berada ditingkat Kota dengan pengawasan oleh pihak Bawaslu. Dengan partisipasi masyarakat yang didata sedemikian rupa untuk mendapatkan presentase partisipasi masyarakat menjelang pilwali. Pilwali sendiri menjelaskan bahwa seseorang yang dipilih sebagai pemimpin atau kepala daerah wilayah Kota yang menjabat selama lima tahun. Dengan maksimal jabatan selama dua periode atau sepuluh tahun. Sama dengan pemilihan lainnya, pilwali sendiri memiliki wakil Wali Kota yang bertugas membantu sang Wali Kota terpilih.

Adanya pilwali sebagai salah satu bentuk kegiatan politik yang digunakan masyarakat untuk mengatur warga negaranya. Seorang pemimpin dijadikan sebagai seseorang yang mampu untuk memberikan perubahan serta gerakan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang dianggapnya baik dan benar. Dalam kegiatan politik ini tentu sudah menjadi hal yang umum apabila dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam mengusung calon dukungannya, apalagi wilayah Kota memiliki berbagai permasalahan yang kompleks apabila dibandingkan dengan wilayah Kabupaten atau Kota. Inilah yang membuat wilayah Kota dijadikan sebagai bentuk kategori yang berbeda dengan beberapa standar yang lebih dibandingkan

dengan wilayah kabupaten. Memiliki urusan yang sama dalam otonomi daerah tetapi memiliki kategori yang berbeda dalam wilayahnya.

Pada tahun 2020 ini akan dilakukan Pilwali dan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Surabaya salah satu Kota yang menjadi sorotan masyarakat terkait siapa yang bakal mencalonkan diri maju dalam Pilwali 2020 dan siapa pengganti sosok Wali Kota saat ini yaitu Risma . Kurang beberapa bulan saja antusiasme yang ditunjukkan oleh publik melalui diskusi -diskusi atau pun di media masa sudah ramai banyak sekali yang sudah menebak-nebak dan memperbincangkan siapa kira-kira yang bakal mencalonkan diri menjadi Wali Kota dan calon Wali Kota Surabaya. Dilansir dari media online Liputan6.com mengatakan bahwa pilwali 2020 nantinya menjadi sebuah panggung pertarungan besar bagi para partai besar seperti partai PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, dan Gerindra. Dikatakan juga bahwa Kota Surabaya merupakan salah satu Kota strategis dalam persiapan ke konsentrasi nasional yakni Pilpres 2024.

Jika berbicara mengenai Kota Surabaya, memang sangatlah membekas dipikiran masyarakat tentang Wali Kota mereka yaitu Tri Rismaharini. Konstruksi masyarakat tentang sosok Risma yang begitu berjasa dalam

pembangunan Kota Surabaya terlanjur tertanam kuat dibenak masyarakat khususnya warga Kota Surabaya sendiri. Risma merupakan sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Wali Kota di Surabaya dan berhasil memimpin Surabaya selama 2 periode.

Selama periode kepemimpinannya yang dikenal tegas dan sangat mengayomi warga Surabaya, Risma telah berhasil mengubah Surabaya menjadi Kota yang indah dan bersih. Menurut berita media online Liputan6.com, ada beberapa prestasi yang diraih Risma selama beliau menjabat antara lain adalah Kota Surabaya mampu meraih piala Adipura berturut-turut selama 7 kali sejak tahun 2011 hingga 2017 pada kategori Kota metropolitan. Pada puncaknya tahun 2016 Surabaya mampu meraih gelar Adipura Paripurna karena telah berhasil menjadikan Surabaya menjadi Kota yang berhasil dalam menjaga kebersihan serta berhasil dalam pengelolaan lingkungan perKotaan. Risma juga masuk dalam kategori 10 wanita paling inspiratif 2013. Risma pun mendapatkan *Ideal Mother Awards* oleh *Islamic Educational Scientific and Cultural Organization* (ISESCO) tahun 2016. Sesudah itu Risma menyabet penghargaan *Mayor of the Month* dimana Risma diberi penghargaan sebagai Wali

Kotaterbaik. Pada tahun 2014, Kota Surabaya menjadi satu – satunya perwakilan dari Indonesia yang kemudian mendapatkan penghargaan *Innovative City of the Future* di London.

Sosok Risma yang tegas dan konsisten melawan tindakan korupsi membuatnya diberikan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Awards pada tahun 2015. Risma juga telah mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Tongmyong University, Busan, Korea Selatan. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasinya yang penuh dan professional dalam mengemban amanah sebagai Wali Kota Surabaya. Pengaruhnya yang begitu kuat dan luar biasa membuat warga Surabaya selalu menyanjung kinerjanya. Tahun 2020 ini merupakan tahun terakhir Risma menjabat sebagai Wali Kota Surabaya karenanya akan diadakan Pilwali 2020 untuk menggantikan posisinya sebagai Wali Kota Surabaya.

Mengutip dari berita online pojokpitu.com, dari hasil Pusat Riset Pilkada JTV diketahui bahwa warga Surabaya mendambakan sosok pemimpin yang jujur, mampu mengatasi masalah ekonomi, masalah pendidikan, mengatasi masalah sosial, dan mampu mengatasi masalah kesehatan. Pada urutan ke 7 kriteria pemimpin ideal yang didambakan warga Surabaya

adalah pemimpin yang tegas serta berani bersikap. Pada urutan ke 8 hingga 10 adalah sosok pemimpin yang berwawasan luas, berakhlak baik serta suka blusukan.

Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti karena peneliti ingin mengetahui bagaimana antusiasme warga Surabaya khususnya di Kelurahan Ngagel Rejo jelang Pilwali 2020. Setelah sosok Risma yang begitu berpengaruh dengan segala pencapaiannya untuk Surabaya. Karena dari data yang diperoleh dari Kelurahan tersebut merupakan Kelurahan dengan partisipasi rendah diantara daerah lainnya. Maka dari itu dengan tingkat partisipasi yang rendah pada Pilwali sebelumnya, ditambah dengan berakhirnya jabatan Risma menjadi Wali Kota, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana antusiasme warga Kelurahan Ngagel Rejo jelang Pilwali 2020.

Penelitian terdahulu, Pertama, ditulis oleh Indra Kesuma Nasution. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan peran etnis dalam mempengaruhi dinamika pemilihan langsung pada tahun 2010 di Medan, Indonesia. Tnisitas di Medan, Sumatera. Terindikasi ditemukan calon waliKota Medan sering menggunakan isu etnis dalam politik praktis. Isu tersebut digunakan untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Akibatnya

masyarakat memilih tidak berdasarkan program yang ditawarkan oleh calon waliKota. Seperti program pendidikan gratis, atau progam lainnya ternyata tidak bersaing dengan signifikan. Ada persepsi di masyarakat bahwa waliKota yang berasal dari komunitas etnis yang sama akan memberi banyak manfaat. Selain itu, pemilihan langsung putaran pertama dan kedua di Medan adalah tentang kompetisi antar etnis. Pemilihan yang didasari akan isu etnis memiliki dampak yang negative pada keberlanjutan demokrasi dan desentralisasi di Indonesia, terutama di Medan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Ihsan Kamalak . Penelitian tersebut secara komparatif menganalisis partisipasi pemilih melalui ukuran populasi dalam pemilihan lokal dan nasional di Turki. Turki membagi daerah pemilihan 2009 dan pemilihan nasional 2011 menjadi 13 kategori menurut jumlah pemilih. Penelitian tersebut mencoba untuk menguji hipotesis, pemilihan lokal dilakukan di bawah pengaruh politik nasional, dan pemilih menganggap pemilu lokal kurang penting daripada pemilu nasional. Penelitian tersebut menemukan penurunan jumlah pemilih yang signifikan dalam pemilihan lokal, tetapi tidak dalam pemilihan nasional. Sementara jumlah pemilih di daerah metropolitan juga lebih

tinggi dalam pemilihan nasional daripada pemilihan lokal..

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Reinhard Simanjuntak, Indarja dan Untung Dwi Hananto. Penelitian membahas tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Medan yang dilaksanakan untuk pertama kalinya secara serentak hari Rabu pada tanggal 9 Desember 2015. Secara serentak tersebut maksudnya bahwa tidak hanya dilakukan untuk Kota Medan saja, tetapi dilakukan dalam skala nasional juga, yang mana masa jabatan kepala daerah tersebut habis pada tahun 2015 yang lalu.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pemilu pada serentak di Kota Medan pada tahun 2015 dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis masalah-masalah yang dialami KPU Kota Medan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang untuk pertama kali dilaksanakan secara serentak pada tahun 2015. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dimana penelitian hukum difokuskan pada norma hukum positif yang berlaku. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan dilengkapi wawancara dengan KPU Kota Medan sebagai pelaksana jalannya proses pemilu tersebut, serta Panwaslu Kota Medan sebagai

panitia pengawas pada saat pemilihan berlangsung. Seluruh data yang diperoleh penulis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan tahun 2015 terbagi menjadi 2 tahap, yaitu: (1) persiapan yang meliputi (a) perencanaan program dan anggaran, (b) penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, (c) perencanaan penyelenggaraan, (d) pembentukan PPK dan PPS, (e) pembentukan panwas, (f) pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan, (g) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, (h) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; (2) penyelenggaraan yang meliputi (a) pengumuman pendaftaran pasangan calon, (b) pendaftaran pasangan calon, (c) penelitian persyaratan pasangan calon, (d) penetapan pasangan calon, (e) pelaksanaan kampanye, (f) pelaksanaan pemungutan suara, (g) penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih, (h) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, (i) pengusulan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih. Adapun permasalahan yang timbul adalah terjadi sengketa administratif dan masih maraknya golongan putih atau golput.

Keempat, penelitian ditulis oleh Ahclak Asmara Yasa. Membahas mengenai Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi terhadap Pemuda Pemilih Pemula di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa). Tujuan dari penelitian tersebut yaitu Pertama Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pemilih pemula dalam pelaksanaan pilkada serentak di selenggarakan pada tahun 2015 khususnya di Kabupaten Gowa, Kedua untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015. Pokok-pokok permasalahan tersebut yaitu bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat pemilih pemula di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Gowa, faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2015. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah fenomena yang berkaitan langsung dan dilakukan oleh peneliti yang menggambarkan fakta. Hasil penelitian menggambarkan pertama, bahwa masyarakat pemilih pemula yang ada di

Kelurahan Batang Kaluku sudah cukup ikut serta dalam proses pemilihan kepala daerah, namun hanya pada tahapan ikut serta dalam memberikan hak suaranya ketika pemungutan suara berlangsung, Kedua, bahwa partisipasi politik masyarakat pemilih pemula di Kelurahan Batang Kaluku sudah sangat baik (aktif) yang dapat dilihat dari tingginya masyarakat pemilih pemula untuk ikut serta dalam proses pemilihan pilkada, dengan harapan sosok pemimpin yang terpilih nantinya dapat membawa daerah mereka lebih baik lagi.

Kurangnya pemahaman politik serta proses penyampaian informasi mengenai politik merupakan salah satu faktor penghambat bagi masyarakat pemilih pemula. Pendidikan politik yang diberikan pemerintah yang bersangkutan terhadap pemilih pemula agar dapat melibatkan pemilih pemula secara efektif yang akan memperkuat dan mempermudah partai politik dan penyelenggara pemilu pada langkah tindak selanjutnya. Pendekatan pendidikan politik terbatas pada stimulasi-stimulasi yang bersifat konvensional dan terbatas pada ruang-ruang kelas dan perkuliahan. Pada konteks tersebut, pemilih pemula dihadapkan pada hal yang praktis yang dapat mengintegrasikan pemahaman politik yang sederhana dengan praktik politik yang pada

daerah tertentu dapat mengintegrasikan secara efektif pendidikan politik tersebut.

Kerangka berpikir yang digunakan Untuk dapat mengetahui dan memahami antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum Walikota Surabaya. Pendekatan teori tindakan sosial digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan secara mendalam terkait dengan partisipasi politik masyarakat. Antusiasme atau partisipasi merupakan suatu tindakan yang memiliki dasar tindakan seseorang akankah antusias dan berpartisipasi dalam pemilihan wali Kota. Setiap manusia memiliki arti bagi sesuatu yang dituangkan dalam bentuk tindakan. Antusias ataupun tidak keinginan untuk berpartisipasi atau tidak memiliki arti masing masing yang unik. Banyak hal akan mempengaruhi tindakan seseorang. Dihubungkan dengan konsteks persoalan antusiasme masyarakat dalam pemilihan waliKota mendatang banyak hal yang mempengaruhi kemudian menciptakan suatu arti yang menentukan tindakan politik seseorang. Sebagai contoh habisnya periode Wali Kota Risma menjadikan alasan kuat yang mempengaruhi antusiasme masyarakat. Kinerja pemerintah juga menjadi salah satu yang menentukan tindakan masyarakat akan berpartisipasi atau tidak.

Kejenuhan masyarakat terhadap perpolitikan Indonesia secara umum juga dapat memberikan pengaruh yang akan menentukan tindakan masyarakat.

Kepercayaan publik adalah konsep yang diambil dari teori modal sosial. Konsep kepercayaan publik ini digunakan untuk melengkapi kekurangan atau untuk menyempurnakan teori tindakan sosial dalam memahami antusiasme masyarakat dalam pemilihan Walikota. Kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi kian menurun karena banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik. Tak terkecuali dalam hal perpolitikan. Siklus perpolitikan Indonesia yang banyak sekali berujung pada ketidakpuasan masyarakat. Seperti politisi yang merakyat hanya saat ingin menjabat. Janji kampanye yang hanya menjadi omongan manis tanpa tindakan. Banyaknya politisi terjerat kasus korupsi. Masih banyak hal yang menjadi faktor hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan dunia politik pada umumnya. Tentu berakibat pada gelaran pemilihan umum. Antusiasme masyarakat kian menurun karena pemilihan umum tak menjadi jaminan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Hal ini juga berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap pemimpin Kota Surabaya

selanjutnya. Akankah dapat lebih baik atau bahkan lebih buruk, karena itu banyak untuk tidak berpartisipasi.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang berupa penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagai alat Analisa dari penelitian ini, peneliti ini menggunakan perspektif teori tindakan sosial. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang akan menghasilkan data berupa kata-kata dari fenomena yang telah diamati dan dikaji. dilakukan pada bulan Februari-Maret di kampung Krukah Selatan yang termasuk dalam Kelurahan Ngagelrejo. Subyek dari penelitian ini adalah warga kampung Krukah Selatan 12 A yang disinyalir antusiasme mereka minim saat mengikuti kontestasi politik. Sumber data disini terbagi dalam dua kategori yang pertama sumber data primer yang kedua sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara. Seperti pada penelitian ini sumber data primer yaitu hasil dari wawancara mendalam dengan narasumber serta data-data yang diperoleh ketika observasi di lapangan.

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan paling penting dalam suatu penelitian. Dalam

penelitian ini mnggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi. Observasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian agar peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi sebenarnya. Wawancara merupakan suatu cara atau media untuk dapat berkomunikasi interaktif antara dua atau lebih guna memperoleh data yang mendalam untuk dianalisis. Dokumentasi merupakan sebuah arsip yang dapat berupa foto, video atau tulisan. Adanya dokumentasi menjadi suatu alat untuk memperlihatkan bahwa wawancara dan observasi dapat dipercaya. Pada penelitian ini penelitian menggunakan ke tiga Teknik pengumpulan data diatas mulai dari wawancara, observasi, serta dokumentasi agar data yang diperoleh saling mendukung dan valid.

Analisis data atau identifikasi serta mengambil kesimpulan. Pada saat wawancara, sebagai pewawancara peneliti sudah dapat langsung menarik kesimpulan dari jawaban yang diungkapkan oleh informan maka jika dari wawancara tersebut data yang didapat dirasa belum valid maka pewawancara akan terus menggali jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema yang telah disediakan. Dalam

penelitian kualitatif dalam analisis data dapat dilakukan dengan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data merupakan tahap dimana peneliti akan memilih dan memilah mana data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan dan kemudian peneliti akan menyederhankan data tersebut kemudian dinarasikan. Tahap selanjutnya adalah tahap penyajian data, tahap ini bertujuan untuk mempermudah peneliti membaca atau melihat gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan dimana pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dari gambaran hasil penelitian yang telah dianalisa menggunakan perspektif teori yang telah ditentukan yaitu perspektif teori tindakan sosial dan kepercayaan publik.

C. Hasil dan Pembahasan

Kampung Krukah Selatan merupakan salah satu kampung yang masuk pada Kelurahan Ngagelrejo. Kampung ini letaknya strategis dekat dengan lokasi dimana warga dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari maupun kebutuhan yang lain seperti otomotif, elektronik, dan lain-lain. Dengan hal itu maka kondisi sosial-ekonomi warga di kampung Krukah Selatan masih terbilang status ekonomi

menengah. Meskipun di daerah perkotaan, hubungan kekerabatan kampung Krukah Selatan masih erat jika dibandingkan masyarakat perkotaan yang tinggal dan hidup di area perumahan. Secara historis, pada masa kolonial kampung Krukah termasuk daerah yang kaya minyak. Terdapat kilang minyak di daerah Wonokromo, Surabaya sekitar tahun 1890-an, ini adalah kilang minyak tertua di Hindia-Belanda pada saat itu. Kilang minyak ini dipelopori oleh Andrian Stoop yang membentuk NV Doordsche Petroleum Maatschappij pada tahun 1887, dengan luas lahan 152,5 km persegi di kampung Krukah. (sumber: Surya.co.id)

Subyek penelitian ini adalah warga Kelurahan Ngagelrejo khususnya kampung Krukah Selatan 12A yang sudah memenuhi kriteria dan syarat partisipasi dalam kontestasi politik khususnya pilwali yang diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020. Pada saat peneliti mengunjungi subyek penelitian tersebut (warga Krukah Selatan 12A) kedua informan kebetulan sedang libur dari pekerjaannya. Subjek penelitian pada penelitian ini memiliki pekerjaan sebagai pemilik usaha kuliner yang berlokasi di sentra kuliner Bratang Binangun dan karyawan swasta di salah satu perusahaan yang ada di Surabaya serta memiliki jabatan sebagai HRD. Latar belakang

pendidikan yang dimiliki oleh kedua subyek penelitian tersebut adalah tamat SMP (pemilik usaha kuliner) dan Sarjana ekonomi (karyawan swasta). Kondisi rumah kedua subyek penelitian ini sederhana, nyaman, dan sangat layak untuk dihuni, jadi ketika kami mampir ke kediaman mereka sangat nyaman pada saat proses wawancara untuk memperoleh data yang kami inginkan.

Untuk subyek yang pertama, arti pilwali adalah sebuah proses pemilihan untuk pergantian pemimpin atau walikota yang akan menjadi panutan penduduk Kota Surabaya. Sedangkan subyek yang kedua memiliki arti pilwali adalah ajang pemilihan untuk menentukan pemimpin yang dapat memajukan pembangunan dari segala aspek di Kota Surabaya. Kedua informan ini memiliki kesamaan belum mengerti siapa calon yang akan diusung pada pilwali September 2020 mendatang. Respon dari kedua subyek ini terhadap pilwali adalah bimbang karena setelah pemimpin baru resmi dilantik, apakah kinerja waliKota memberikan perubahan yang positif atau malah sebaliknya memberikan dampak negatif serta kemerosotan dalam hal pembangunan, aspek ekonomi, serta penanggulangan bencana contohnya banjir di Kota Surabaya. Kedua subyek ini sama-sama tidak terlalu berharap kepada walikota yang akan menggantikan

bu Risma karena seperti yang sudah dijelaskan mereka tidak tau siapa calon yang diusung, latar belakang para calon, visi-misi calon, dan lain sebagainya. Mereka lebih pesimis dengan Pilwali yang akan dilaksanakan karena mereka sudah cocok dengan kinerja bu Risma selama dua periode, mereka juga tidak yakin apakah pada hari H pelaksanaan pilwali akan berpartisipasi memberikan suara mereka untuk pemimpin yang baru.

Kedua subyek ini tidak begitu menantikan momen-momen seperti ini karena mereka menganggap ada yang lebih penting utamanya adalah pekerjaan yang lebih diprioritaskan oleh kedua subyek penelitian, menurut mereka pemimpin yang akan menggantikan bu Risma dirasa kinerjanya akan berbeda dan mulai beradaptasi dari awal dengan kebijakan baru yang akan dibuat, selain itu mereka menganggap bahwa proses pilwali selalu monoton dan membosankan.

Makna atau arti pilwali menjadi sangat penting untuk diketahui karena itulah hal mendasar bagi kesadaran politik seseorang. Setiap individu memiliki arti yang dipercayainya masing masing. Baik itu datang dari suatu pengaruh kelompok maupun datang dari individu itu sendiri. Arti pemilihan umum atau kususnya dalam kasus ini adalah pilwali bagi satu individu adalah

suatu momen pergantian pemimpin atau Wali Kota sebagai panutan (*role model*) yang dapat dijadikan contoh bagi masyarakat Surabaya. Dari sini dapat dikatakan secara mendasar informan berangkat dari rasionalitas instrumental dalam mengartikan pemilihan Walikota mendatang. Arti lain yang muncul pilwali adalah momen menentukan pemimpin yang akan memajukan pembangunan Kota Surabaya. Artinya ini juga berangkat dari rasionalitas instrumental. Masing masing individu memahami arti pilwali secara rasional instrumental. Tujuannya adalah menemukan pemimpin untuk Kota dan rakyatnya alat yang digunakan adalah suara dipemilihan umum. Namun antusiasme tidak cukup dinilai dari aspek ini. Karenanya peneliti tidak menggunakan pendekatan teori kesadaran karena pemahaman tanpa tindakan adalah pemahaman yang tidak bermanfaat.

Kepercayaan publik sebetulnya masih memiliki beberapa kepercayaan yang dilontarkan dalam bentuk harapan. Menemukan pemimpin yang mampu menjadi *role model* seluruh rakyat dan menemukan pemimpin yang membangun Kota. Masyarakat masih memiliki kepercayaan itu, Persoalannya adalah kepercayaan itu ditujukan kepada siapa. Apakah para pelaku politik atau sistem politik. Kepercayaan ini pertama ditujukan

kepada sistem pemilihan umum demokrasi dan bukan kepada politisinya. Masyarakat percaya jika pemilihan umum ini suatu saat akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Demokrasi adalah tentang rakyat. Sangat tidak setuju apabila dikatakan demokrasi telah dirusak oleh para golongan putih. Sesungguhnya demokrasi dirusak oleh para elit (politik) demokrasi itu sendiri. Golongan putih tidak dapat disalahkan atas kesalahan yang bukan dimulai olehnya.

Pengetahuan politik masyarakat juga akan menentukan besaran antusiasme masyarakat pada pilwali. Pengetahuan politik ini berupa siapa siapa calon potensial yang akan maju menjadi calon walikota. Untuk calon Wali Kota walaupun masih dalam tahap pencalonan partai. Namun nama nama kuat sudah menyebar di banyak media pemberitaan. Namun Setiap informan mengaku sama sekali tidak mengetahui nama nama tersebut. Pernyataan ini tentu sangat bertolak belakang dengan pernyataan pertama bahwa arti Pilwali adalah menemukan pemimpin. Kebiasaan politik kita hingga saat ini adalah kurang mengenalnya secara mendalam terhadap calon-calon pemimpin. Kecuali apa yang disampaikan di banyak pemberitaan dan kampanye. Dimana hal itu telah dipoles sedemikian rupa untuk kepentingan calon. Pemahaman

pemilihan umum sudah bertolak belakang dari tindakan yang kecil namun utama. Karena itu dari awal dikatakan pemahaman tanpa tindakan adalah mimpi di siang bolong. Memahami bahwa kita harus mencari pemimpin yang mampu menjadi *role model* mampu membangun Kota namun tidak ada tindakan dalam pencarian tersebut.

Antusiasme masyarakat rendah dalam mencari dan mengenal para calon pemimpin. Dampak dari hal ini cukup besar dan berbahaya. Tidak mengenali calon yang akan dipilih membuat masyarakat jadi cenderung sekedar memilih tak peduli. Bahkan bertahannya politik uang di Indonesia ini disinyalir karena ketidakpedulian masyarakat yang berawal dari ketidaktahuan. Namun ketidaktahuan masyarakat ini tidak serta merta kesalahan masyarakat. Karena jika didalami terdapat anggapan masyarakat bahwa calonnya sama saja tidak ada yang bisa dipilih. Ditambah dengan adanya fenomena Risma efek ini memperburuk antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Wali Kota mendatang. Masyarakat kurang yakin akankah Pilwali yang akan datang mendatangkan atau menampilkan pemimpin yang baik atau mungkin lebih baik dari Wali Kota Risma. Bahkan karenanya muncul ketakutan masyarakat jika saja pemimpin baru nantinya

cenderung lebih buruk daripada Risma. Penilaian masyarakat terhadap kinerja Risma selama 2 periode ini mendapat predikat baik dari masyarakat. Sehingga untuk pemimpin baru nantinya masyarakat Kota Surabaya memiliki standar dan ekspektasi tinggi.

Tidak dapat dipungkiri pensiunnya Risma sebagai wali Kota Surabaya akan menjadi titik besar bagi kemerosotan *antusiasme* politik warga Surabaya. Tentu angka partisipasi politik praktis masyarakat akan menurun. Tindakan inilah yang disebut sebagai tindakan afektif. Tindakan yang menekankan pada perasaan, pengalaman dan emosi. Warga Kota Surabaya dengan wali Kota Risma selama satu *decade* ini memiliki hubungan emosional yang cukup tinggi. Banyak rakyat menaruh perasaan pada pemimpin satu ini untuk terus memperbaiki dan membangun Kota Surabaya. Sehingga membuat warga tetap ingin Risma menjadi wali Kota. Sehingga warga memilih untuk tidak memilih karena menilai tidak ada yang mampu sebaik kinerja Risma. Hal ini tentunya merupakan tindakan afektif yang mengutamakan emosi dan perasaan kepada Risma dengan mengesampingkan rasio yang ada bahwa Risma secara hukum tak mungkin lagi menjabat sebagai walikota Surabaya karena telah mencapai limit jabatan yakni

dua kali terpilih. Seakan tidak dapat menerima rasio tersebut banyak masyarakat tidak antusias dalam menyambut pilwali yang akan datang.

Pemilihan umum dalam istilah lain disebut juga sebagai pesta demokrasi atau pesta rakyat. Momentum dimana mana satu satunya kekuasaan rakyat benar benar dapat dirasakan. Konsep demokrasi adalah konsep yang berawal dari pemikiran dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga dikatakan dalam demokrasi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sayangnya dalam implementasinya kekuasaan rakyat hanya sampai TPS saja. Sesudah itu rakyat kembali lagi tak jadi apa apa. Pemilihan umum hanya menjadi pemindahan kekuasaan saja. Selaku pesta anehnya era ini pemilihan umum tak lagi dinanti nantikan. Informan menganggap pemilihan Wali Kota ini adalah hal biasa, bukan spesial apalagi pesta. Mungkin pesta namun bagi para elit politik saja karena bersamaan juga dengan bagi bagi kekuasaan. Pesta yang tak dinantikan. Karena sejatinya rakyat tidak menikmati apapun dari hal tersebut. Kecuali beberapa janji manis para politisi.

Terlihat lagi betapa rendahnya *antusiasime* masyarakat. Pemilihan umum bukan satu hal yang special lagi sehingga harus disambut dengan gembira dan semangat. Namun hanya sebatas agenda politik rutin

lima tahunan saja. Wajar jika masyarakat menganggapnya sebagai hal yang monoton dan membosankan. Karena masyarakat tidak benar benar mendapatkan pengaruh yang signifikan antara siapa pemimpinnya dengan kesejahteraan hidupnya. Akibatnya masyarakat memiliki rasional instrumentalnya sendiri. Yakni masyarakat lebih memilih untuk bekerja seharian daripada harus libur sehari karena pergelaran pemilihan umum. Karena rasio masyarakat bekerja akan lebih berdampak nyata untuk mendapat kesejahteraan hidup. Sehingga jika diberi pilihan ingin bekerja atau pulang untuk ke TPS masyarakat lebih memilih untuk bekerja karena jelas menghasilkan pendapatan. Sedangkan ke TPS hanya mendapat ketidak jelasan.

Pemerintah beserta politisi dan elit politik lainnya telah kehilangan banyak kepercayaan dari masyarakat. Salah satu wujud ketidakpercayaan ini adalah antusiasme masyarakat pada pemilihan umum yang kian menurun di beberapa wilayah[9]. Birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga resmi yang menjadi institusi legal politik sangat berhubungan dengan rakyat. Dengan negara yang menganut asas demokrasi rakyat adalah yang utama. Apa yang terjadi apabila rakyat telah kehilangan kepercayaan.

Menurunnya antusiasme masyarakat terhadap pemilihan umum ini hanyalah dampak kecil. Masyarakat sulit mempercayai pemimpin pemimpin baik yang baru maupun lama, yang tua maupun yang muda. Kasus Surabaya ini menjadi cerminan bahwa Indonesia mengalami darurat pemimpin. Menjadi wajar apabila antusiasme masyarakat sangat kecil. Dari segi kesadaran politik, sosialisasi politik, pengetahuan politik semua menunjukkan bahwa masyarakat khususnya pada daerah penelitian tidak antusias menyambut pemilihan Wali Kotayang akan datang. Harapan masyarakat akan pemimpin baru sangatlah minim.

D. Kesimpulan

Antusiasme Warga Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya dalam pemilihan waliKota masih sangat rendah atau kurang. Secara mendasar pemahaman masyarakat tentang pemilihan umum sudah baik namun hal itu masih sebatas pemahaman dan bukan tindakan yang menunjukkan suatu antusiasme. Menurutny pemilihan umum adalah momen untuk mendapatkan sosok pemimpin yang mampu dijadikannya sebagai *role model* rakyat Surabaya dan mampu membangun Kota Surabaya. Antusias masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tindakan tindakan yang dilakukan. Beberapa diantaranya adalah

pengetahuan tentang calon calon pemimpin baru Kota Surabaya. Masyarakat sama sekali belum mengetahui dan tidak tertarik untuk mencari tahu apalagi mendalami sosok tersebut. Hal lain yang menjadi adalah pesimistis warga untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik atau minimal sebaik waliKota saat ini.

Pesimistis ini merupakan bentuk mudarnya kepercayaan masyarakat terhadap perpolitikan Indonesia saat ini. Pemilihan umum tak lagi berkesan di hati masyarakat. Pemilihan umum bukan lagi pesta demokrasi rakyat yang dinantikan. Bahkan bekerja seharian lebih baik daripada libur seharian karena harus datang ke TPS. Faktor-faktor tersebut memicu tindakan sosial masyarakat. Seperti tindakan rasional instrumental untuk lebih memilih bekerja. Tindakan afektif yang memilih untuk tidak datang ke TPS karena pesimis bisa mendapatkan pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Tindakan rasio nilai yang memilih karena tidak enak dengan teman. Tindakan tradisional yang hanya ikut ikutan. Masyarakat tidak lagi antusias hingga seakan akan pemilihan umum telah kehilangan kesakralannya.

Pemerintah beserta elit politik lainnya harus mampu mengembalikan kepercayaan rakyat yang telah pudar.

Pemerintah harus mendapatkan legitimasinya sendiri sebagai lembaga yang menaungi masyarakat. Pemilihan umum harus lebih dekat lagi dengan rakyat. Menghadirkan optimisme pemilihan umum adalah momen perubahan yang lebih baik. Tentu tidak hanya diucapkan melalui kata kata melainkan pada kerja nyata. Indonesia harus mampu menghadirkan pemimpin yang benar benar layak memimpin seluruh lapisan masyarakat. Hadirkan informasi seutuhnya tentang calon pemimpin yang akan dipilih masyarakat dengan transparan. Tentu puncaknya adalah penegakan hukum bagi pemimpin yang tidak adil.

Daftar Pustaka

- A. M. Fauzi, "Jokowi's Political Branding for the Victory of the President," *Adv. Sci. Lett.*, vol. 23, no. 12, pp. 11674–11677, 2018.
- A. M. Fauzi, A. Sudrajat, A. Affandi, and A. Raditya, "Maintaining Identity Political Culture in Indonesia," *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 953, no. 1, 2018.
- S. P. Tahun *et al.*, "Undang Dasar Negara Republik wilayah di Indonesia yaitu mulai seperti Undang-Undang Nomor Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Perubahan Tahun 2014 Tentang Pemerintah Undang- urusan baik urusan yang berada," vol. 6, pp. 1–11, 2017.
- A. M. Fauzi, "Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019," *J. Islam. Civiliz.*, vol. 1, no. 01, pp. 40–48, 2019.
- D. S. Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, "partisipasi politik masyarakat pada pilkada serentak 2015 di kabupaten gowa (studi terhadap pemilih pemula di kel.batang kaluku kec.somba opu kab.gowa" Skripsi," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 8, no. 9, pp. 1–58, 2017.
- D. Mulyaningtyas, "5 prestasi Tri Risma harini kelola surabaya hingga dapat gelar doktor honoris causa," *Liputan 6*, 2019. [Online]. Available: <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4077114/5-prestasi-tri-Risma-harini-kelola-surabaya-hingga-dapat-gelar-doktor-honoris-causa>.
- T. Redaksi, "Menuju Pilwali Surabaya 2020 : Warga Dambakan Pemimpin Jujur," *Pojokpitu.com*, 2020. [Online]. Available: <http://m.pojokpitu.com/baca.php?idurut=94778>.
- I. K. Nasution, "Ethnicity, Democracy and Decentralization: Explaining the Ethnic Political Participation of Direct Election in Medan 2010," *Procedia Environ. Sci.*, vol. 20, pp. 496–505, 2014.
- I. Kamalak, "Comparative Analysis of Voting Participation: The Case of Turkey's 2009 Local and 2011 National Elections," *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 81, pp. 314–323, 2013.